

## **POLITIK KEKERASAN DAN PEMBISUAN: TRANSFORMASI SOSIAL YANG PELIK**

**I Ngurah Suryawan**

Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya  
Universitas Papua (UNIPA), Manokwari, Papua Barat  
[ngurahsuryawan@gmail.com](mailto:ngurahsuryawan@gmail.com)

### **Abstract**

This paper discusses the implications of the tragedy series that have general developed strategies in the communities in Papua and how the communities responded the tragedy. Along with the memories of the violence and how they have been suffering by the tragedy, there was also a “culture” to remind “silent”—afraid to bear witness. The communities became a muted group. The culture of the silences also grew in the education matter. Materials in formal education in Indonesia somehow fail to recognize the tragedy series that happened to the people of Papua. There are many encouragements to Papuan to break the culture of silence, brave to be witnesses, educate others about the tragedy. In this paper the discussion will explore the relation between the violence that the Papuan had been experienced personally and the culture of silence that later grown and settled in their communities.

Kata kunci: violence, Papua, culter of silence, muted group

Kekerasan, kekejian, kekejaman, ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia sering kali juga lebih berkaitan dengan kebisuan pihak korban sendiri daripada sekadar akibat kecurangan atau keserakahan pihak-pihak yang lain (Budi Susanto, S.J, 2003: 6).

### **Pendahuluan**

Di sebuah laman portal berita alternatif yang dikelola oleh anak-anak muda Papua, saya tertegun membaca sebuah posting yang berisikan seruan beberapa pimpinan gereja bagi umat Kristiani di Papua menyambut Natal 25

Desember 2015. Forum Kerja Oikumenis Gereja Papua mengajak umat Tuhan untuk memaknai natal 2015 dengan mengisi kegiatan membangun dan menjadikan bulan Desember sebagai waktu untuk berdamai. Dalam seruan para pimpinan gereja tersebut diungkapkan:

Berkomitmen menjaga anak-anak supaya sehat dan maju dalam pendidikan, agar mereka menjadi pembawa damai di tanah ini. Bekerja keras menafkahi keluarga, merefleksikan diri dengan natal dan menjaga lilin kehidupan Papua supaya tetap menyala dan bersinar di tengah-tengah kegelapan pembangunan serta kekerasan di tanah ini.<sup>1</sup>

Seruan tersebut menyayat hati karena diungkapkan oleh para pimpinan gereja di tengah situasi tanah Papua secara keseluruhan masih diselimuti dengan berbagai kasus kekerasan dan penderitaan yang tidak jelas penyelesaiannya oleh negara. Dalam rangka merayakan dan memaknai Natal serta pergantian tahun 2015, umat Kristiani di Papua diminta untuk merenungkan banyak penderitaan, trauma dan kehilangan anak-anak, perempuan, laki-laki, kerabat dan saudara yang telah meninggal dunia melalui berbagai cara dan teknik. “Kami sebagai pribadi dan pimpinan gereja berefleksi dan mencoba memahami kegoncangan yang dialami warga, baik secara pribadi maupun kolektif. Ini terjadi melalui sejumlah peristiwa yang masih membayang-bayangi jalan hidup kami,” ungkap para pemimpin denominasi gereja yang terdiri dari Pdt. Dorman Wandikbo (Presiden GIDI), Pdt. Benny Giay (Ketua Sinode Kingmi) dan Pdt. Socratez Sofyan Yoman (Ketua Umum Gereja-Gereja Baptis Papua).

Menjaga agar lilin kehidupan terus menyinari bangsa Papua mengalami rintangan yang sungguh berat. Salah satu sebabnya adalah tidak terhentinya lingkaran kekerasan yang menjadikan rakyat Papua sebagai korbannya. Berbagai tragedi kekerasan menggambarkan bagaimana bangsa Papua seolah-olah—dalam pandangan mereka—akan “dilenyapkan” dari negeri ini. Pengalaman kekerasan tersebut juga semakin menyingkirkan orang Papua dari proyek negara bangsa Indonesia ini.

Dalam pernyataannya tersebut, para pimpinan gereja ini kemudian menguraikan berbagai peristiwa kekerasan yang berlangsung selama tahun 2015. Diantara peristiwa tersebut adalah penembakan di Paniai yang menewaskan 4 orang pelajar (8 Desember 2014), penembakan kilat,

---

<sup>1</sup> Lebih lengkap lihat: <http://suarapapua.com/read/2015/12/19/3041/kebijakan-membangun-papua-jokowi-dinilai-seperti-daendels-kedua> (diakses 23 Desember 2015).

penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang berulang kali terjadi di Yahukimo (Maret-Oktober 2015), penembakan siswa di Dogiyai (Maret 2015), rekayasa kasus Tolikara, 11 warga Tolikara ditembak (17 Juli 2015), sementara oknum penembak dilindungi, penembakan di Timika menewaskan 2 orang Kamoro, (Oktober 2015), penembakan 2 orang Mappi di Merauke (Oktober 2015), penembakan 2 warga Angkaisera, Serui (Desember 2015). Termasuk pembiaran yang mematikan, seperti umat Tuhan yang mengalami hujan es di Kwiyawage dan menewaskan belasan warga sejak bulan Juli 2015. Kematian 43 balita secara misterius di Mbuwa, Nduga (Oktober-Desember 2015). Terjadi juga gangguan dan serangan terhadap kegiatan gereja pada kasus Organda Abepura dan kasus Enarotali pada 15 Agustus 2015 dimana gereja diserang dalam rangka mencari senjata termasuk di Jemaat Sere, Sentani, Jayapura. Dengan rentetan kekerasan tersebut, para pimpinan gereja ini kemudian mengungkapkan:

Dari perkembangan-perkembangan ini, kami gereja memahami bahwa pemerintah sebetulnya memposisikan Papua sebagai pihak atau musuh yang harus dilumpuhkan, disingkirkan secara sistematis, baik itu dari sisi kultur, identitas maupun eksistensi.

Artikel ini mendiskusikan rangkaian tragedi kekerasan kemanusiaan di Tanah Papua berimplikasi sangat buruk bagi totalitas kesaksian atas penderitaan yang mereka (orang-orang Papua) alami dalam kehidupan mereka. Pengalaman kekerasan dan penderitaan itu hidup dalam keseharian kehidupan orang-orang Papua di kampung-kampung. Teror kekerasan di sisi lain menyebabkan budaya bisu berkembang di tengah orang-orang yang diekspresikan dengan keengganan sekaligus ketakutan mereka untuk berbicara tentang kekerasan yang melibatkan *apparatus* (perangkat) negara seperti TNI/POLRI di dalamnya. Bagian awal artikel ini akan menggambarkan sebagian kecil dari periode-periode kekerasan di Tanah Papua dan beberapa kisahnya. Bagian selanjutnya akan mendiskusikan bagaimana rangkaian tragedi kekerasan tersebut memicu budaya bisu di tengah komunitas pendidikan orang-orang Papua pada umumnya. Hal ini tercermin dari keengganan dunia pendidikan di Papua secara umum untuk mengakomodasi dan mendiskusikan secara terbuka tragedi kekerasan kemanusiaan yang dialami oleh rakyat Papua.

## Episode-Episode Kekerasan

Nitibaskara (2002) mengungkapkan konflik-konflik kekerasan yang terjadi di Indonesia, pada galibnya juga memiliki kausa yang tidak tunggal. Faktor mana yang lebih dominan sebagai akar konflik seringkali masih harus dilacak, karena keberadaannya biasanya tertimbun berlapis-lapis di bawah elemen-elemen lain dalam konflik. Kuasa konflik di Indonesia setidaknya dapat dipetakan menjadi tiga rumpun besar. Rumpun pertama adalah kausa ideologi, di dalamnya termasuk kausa agama. Karena kuasa ini, maka konflik yang terjadi menjadi konflik ideologi yang memiliki nuansa politik luas, demikian juga halnya dengan konflik agama. Yang kedua adalah kausa konflik struktural. Yang termasuk dalam rumpun ini adalah kausa-kausanya politik, hukum dan ekonomi. Rumpun ketiga adalah kausa konflik kuasa budaya. Konflik kekerasan yang dipicu oleh konflik budaya lebih merupakan konsekuensi dari masyarakat majemuk. Yang termasuk ke dalam lingkungan kuasa ini adalah kausa kedaerahan (*lokalism*) dan etnisitas (Nitibaskara, 2002: 145-146).

Dalam tesisnya Heryanto (2006) mengungkapkan bagaimana negara menjadi mesin teror dan kekerasan yang paling massif terhadap rakyatnya. Terorisme negara merupakan upaya menciptakan identitas negara-negara kontemporer melalui rekonstruksi subversi. Di Indonesia ini didukung Undang-Undang Subversi yang baru dihapuskan setelah Soeharto jatuh. Undang-Undang tersebut menjadi sarana untuk menciptakan masyarakat yang relatif "stabil" menurut keinginan penguasa. Tetapi itu tidak cukup, mekanisme lain juga dijalankan di antaranya dengan terorisme negara. Terorisme negara adalah serangkaian kampanye disponsori negara untuk menciptakan dan mengembangkan teror terhadap warga. Prosesnya berawal dari rasa ngeri di dalam masyarakat yang timbul karena kekerasan aparat negara dan kroninya terhadap pribadi atau kelompok tertentu. Korban itu (dianggap) mewakili kelompok yang lebih besar. Kekerasan itu sengaja dipamerkan dan disiarkan berulang-ulang untuk melestarikan rasa takut dan saling curiga. Selanjutnya masyarakat sendiri menyebarkan kisah horor itu yang kadang-kadang juga ditambah-tambahi yang pada gilirannya akan menakutkan mereka juga.

Situasi tersebut sangat jelas tergambar di Papua. Kekerasan oleh aparat negara Indonesia terhadap rakyat Papua sebenarnya terjadi sejak awal 1960-an, namun baru pada tahun 1980-an kekerasan politik ini menjadi wacana publik. Pada tahun 1990-an sejak kasus pelanggaran HAM di daerah

Tembagapura pada akhir tahun 1994-1995 terungkap, masalah kekerasan politik dan pelanggaran HAM di Papua menjadi wacana publik nasional di Indonesia. Sejak kejatuhan Soeharto 1998, saat tuntutan kemerdekaan semakin menguat, kekerasan politik juga meningkat. Dari tahun 1998-2006 adalah rentang waktu yang diwarnai secara dominan oleh catatan kekerasan politik aparat keamanan di tanah Papua, terutama oleh TNI dan Polri. Jangan dilupakan juga adalah operasi militer yang berlangsung di Tanah Papua sejak 1965 hingga 1998 yang ditujukan untuk mengakhiri gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) menurut pandangan negara berada di hutan dan wilayah pedalaman Papua. Pada tahun 1980-an sejumlah operasi militer juga berlangsung di Jayapura yang juga bertujuan untuk memutus jaringan gerakan yang disebut (lagi-lagi) OPM yang berada di kota. Maka sejak 1998 itulah tindakan represif TNI/POLRI terhadap rakyat Papua yang mengekspresikan diri mereka dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora di beberapa wilayah di perkotaan dan pegunungan (Widjojo dkk, 2009:196).

LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dalam *Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future* (Widjojo dkk, 2009: 197-198) mencatat terdapat tiga periode kekerasan yang disebut oleh Robin Osborne sebagai *Indonesia's Secret War*, perang rahasia yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan aparatnya terhadap rakyat Papua. Periode *pertama* adalah kekerasan yang berlangsung antara tahun 1961 sampai dengan tahun 1969. Masa ini adalah awal dari hadirnya kekuasaan Indonesia di tanah Papua. Kekerasan dalam periode ini memiliki dua tujuan yaitu operasi infiltrasi dengan tujuan untuk menggagalkan kehadiran Negara Papua Merdeka yang telah dideklarasikan oleh Komite Nasional Papua. Tujuan keduanya adalah untuk menkonsolidasikan dukungan terhadap Indonesia menjelang Pepera 1969. Sasaran kekerasan pada era ini lebih banyak ditujukan untuk mengintimidasi kelompok-kelompok elit Papua di perkotaan. Pada masa ini di daerah-daerah perkotaan menjadi salah satu sentra perlawanan terhadap Indonesia. Perlawanan di kota berlangsung terbuka dan secara bersenjata juga mulai muncul di pedalaman.

Periode *kedua* gelombang kekerasan ditujukan untuk mempertahankan kehadiran Indonesia di Papua. Kekerasan gelombang *kedua* ini berlangsung dari tahun 1970 sampai tahun 1977. Kekerasan ini ditujukan untuk mematikan semua bentuk perlawanan terhadap hasil Pepera sekaligus untuk menyiapkan keamanan bagi kehadiran PT Freeport Indonesia di Papua. Dalam gelombang kekerasan kedua ini tujuan lainnya

adalah untuk memastikan kemenangan Golkar dalam pemilu 1971-1977 serta memastikan jalannya birokrasi pemerintahan.

Gelombang kekerasan *ketiga* dikenal dengan Daerah Otonomi Khusus (DOM). Salah satu kekhasan dalam periode kekerasan DOM ini adalah kekerasan menjar ke kampung-kampung dengan alasan untuk membasmi OPM dan menjaga keberlangsungan pembangunan. Dalam era DOM inilah terjadi banyak peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM. Beberapa contoh diantaranya adalah pengungsian besar-besaran ke PNG maupun pembunuhan dan penghilangan orang. Selama era DOM inilah operasi militer dalam skala kecil berlangsung hampir di seluruh tanah Papua. Yang menjadi wilayah paling menyita perhatian dan terjadinya kekerasan yang intensif adalah di wilayah tambang PT Freeport Indonesia di Timika Provinsi Papua. Pada periode ini jumlah terjadi pembunuhan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang mengkritik jalannya pemerintahan di tanah Papua. Periode ketiga inilah juga terjadi penangkapan dan pembunuhan terhadap Arnold C. Ap. Meski masa DOM sudah dicabut pada Agustus 1998 namun bukan berarti kekerasan berhenti di tanah Papua. Diantaranya adalah operasi militer di wilayah kepala burung Papua meliputi Manokwari, Sorong, Bintuni, Kebar, dan Teminabuan yang terjadi di tahun 1965. Peristiwa kekerasan menjelang Pepera di Erambo-Merauke 1969, Urup dan perbatasan pada tahun 1969, Enarotali-Paniai 1969, Pyramid-Wamena pada tahun 1969, Mimika pada 1977-1978, pengungsian Suku Muyu pada 1984, peristiwa kekerasan di Jila pada tahun 1987, serta pembunuhan di Timika antara 1994-1995 dan kekerasan di Mapenduma pada tahun 1996 (Widjojo dkk, 2009:197-199).

Beberapa episode kekerasan tersebut menggambarkan kompleksitas persoalan kekerasan yang terjadi di negeri ini, terkhusus di Tanah Papua. Kekerasan terhadap orang-orang Papua berlandaskan kepada situs-situs kekerasan yang tersimpan dalam sejarah kehidupan pribadi-pribadi orang Papua yang mengalami tragedi buruk tersebut. Budi Hernawan dan Theo van den Broek (1999; Giay, 2000:8-9) mendeskripsikan jika kita tanpa prasangka mengunjungi pelosok-pelosok tanah Papua seperti Wamena, Paniai, Pegunungan Tengah, Pegunungan Bintang, Mindiptana, Timika, Arso, Mamberamo dan yang lainnya maka dengan mudah kita akan mendengar kisah-kisah sejarah penderitaan yang keluar dari mulut masyarakat biasa. Ingatan rakyat dengan tajam dan jernih mencatat rekaman peristiwa-peristiwa seperti ini:

Di sungai ini kami punya bapa dibunuh; di lereng gunung itu dulu ada sejumlah kampong yang dikasih habis sama ABRI; di lapangan itu tete moyang kami dulu dipaksa untuk membakar koteka karena dianggap primitive; gunung itu dulu kami punya, sekarang orang sudah kasi rusak kami punya mama; dulu kami gampang cari binatang di hutan tetapi sekarang kami tidak boleh masuk karena katanya milik perusahaan yang dilindungi undang-undang negara; kami punya anak tidak bisa maju karena guru-guru di sekolah hampir tidak ada. Susah dapat obat karena mahal, dsb, dst. (Giay, 2000: 9).

Ingatan sejarah seperti itulah yang tersimpan di kehidupan masyarakat biasa yang berhubungan pengalaman mereka terhadap tragedi kekerasan yang masuk ke dalam rumah dan kehidupan pribadi mereka. Narasi-narasi yang diungkapkan seperti di atas tidak pernah dibukukan dan dicatat untuk disebarluaskan menjadi pengetahuan dari generasi ke generasi maupun bagi masyarakat luas. Nada dasar dari segala narasi tersebut adalah: *kami dinilai bukan manusia*. Artinya adalah kami tidak diperlakukan sebagai manusia tetapi sebagai obyek; obyek kebijakan politik, obyek operasi militer, obyek pengembangan ekonomi, obyek turisme dan yang lainnya. Kenyataan itulah yang tersusun selama puluhan tahun dan menggelora sebagai sejarah bangsa Papua.

Sejarah kekerasan ini tidak pernah menjadi bagian dari pelajaran sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah. Sudah tentu karena ini adalah sejarah yang dianggap buram dan dilarang diajarkan kepada para siswa karena akan mendorong munculnya gerakan separatisme generasi muda. Dengan demikian rangkaian peristiwa kekerasan yang berlangsung di tanah Papua hanya menjadi ingatan kolektif bangsa Papua di kampung-kampung dan di seluruh penjuru tanah, rawa, pesisir, dan pegunungan. Ingatan kekerasan dan penderitaan itulah yang diwariskan turun-temurun yang berarti juga pewarisan trauma korban. Oleh seorang teolog Johan Baptist Metz pernah melukiskan ingatan akan sejarah ini dengan menggunakan istilah *memoria passionis* yang berarti ingatan penderitaan. *Memoria passionis* ini bagaikan magma yang tersembunyi dari pandangan mata biasa tetapi menyimpan energi laten yang dahsyat dan siap menjungkirbalikkan *status quo* yang ada (Giay, 2000:8-9).

Beberapa rentetan tragedi kekerasan tersebut di satu sisi memang sangat perlu diungkapkan dan diketahui oleh publik sebagai bentuk pengungkapan kekerasan terhadap kemanusiaan terhadap rakyat Papua. Namun di sisi yang lain, intimidasi yang dalam terhadap rakyat Papua juga

telah memunculkan kebisuan untuk mengungkapkan kisah kekerasan yang mereka alami. Justru di tengah kebisuan itulah akan tumbuh pengendapan kekerasan yang menimbulkan apatisisme sekaligus frustrasi sosial di tengah komunitas orang Papua. Yang akan terjadi sudah bisa diprediksi yaitu brutalitas dan kekerasan massa.

Selain brutalitas dan kekerasan massa, yang berdampak sangat serius justru dalam bidang pendidikan. Dunia pendidikan di Tanah Papua menjadi penuh dengan pengingkaran terhadap realitas yang terjadi di tengah masyarakat, terkhusus dalam hal ini adalah kekerasan terhadap kemanusiaan di Tanah Papua. Kebebasan orang-orang Papua untuk mengartikan “dunia” mereka yang penuh dengan *baku tipu* (saling menipu), penindasan dan pengingkaran terhadap kemanusiaan direbut oleh kekuasaan. Yang terjadi bisa dengan mudah ditebak yaitu tersingkirnya orang-orang Papua dalam berimajinasi dan mengkonstruksikan dunia dan masa depannya melalui pendidikan.

## **Pembisuan**

Dalam sebuah kunjungan ke sebuah sekolah dasar YPK (Yayasan Pendidikan Kristen) di sebuah kampung di Teluk Wondama, saya betul-betul menyaksikan bagaimana anak-anak Papua yang berada di sekitar kampung menjadikan sekolah sebagai tempat “bermain yang sebenar-benarnya. “Mereka berlari-lari, tersenyum, berteriak, dan tertawa bersama teman-temannya. Sekolah ini berada di ujung kampung, di tengah hutan belantara, anak-anak yang mengenakan seragam merah putih seadanya berlari-lari mengitari halaman sekolah yang luas. Di tengahnya terdapat bendera merah putih lusuh yang menjulang tinggi ditegakkan tiang bendera. Sekolah itu terbentuk persegi empat dengan gedung-gedung sederhana yang mengelilingi halaman sekolah. Anak-anak Wondama ini saya rasakan begitu bebas mengekspresikan diri mereka ketika senang bertemu dengan temannya. Anak-anak ini saya rasakan betul-betul menemukan diri dan identitasnya. Kegembiraan dan rasa percaya dirinya terlihat jelas. Mereka inilah anak-anak Papua yang tumbuh di lingkungan alam Papua.

Sementara di sisi yang lain saya menyaksikan bagaimana gedung-gedung yang mengelilingi sekolah tersebut berdiri angkuh menyaksikan anak-anak bermain. Di dalam gedung tersebut hanya terdapat meja-meja dan kursi-kursi yang mulai rusak. Di ruang-ruang guru hanya terdapat beberapa



orang guru yang hanya *mengobrol* sambil membaca salah satu koran lokal di Papua Barat edisi dua bulan yang lalu. Sama sekali tidak ada aktivitas pendidikan di ruang tersebut. Sang kepala sekolah berada di ruangan khusus saya saksikan hanya membuka map-map berwarna merah. Di belakangnya adalah papan putih besar yang menuliskan jumlah siswa dan perlengkapan yang berada di sekolah tersebut. Kedua ruang ini memiliki konteks yang berbeda dan juga berimplikasi serius terhadap konsep tentang pendidikan yang berkembang selama ini di Papua. Ruang pendidikan menjadi hal yang sangat penting sekaligus mereproduksi makna dan pengetahuannya masing-masing. Oleh sebab itulah, ruang menjadi hal yang sangat penting untuk menggambarkan apakah proses pendidikan menghasilkan “manusia yang merdeka” atau “manusia yang bisu” tidak bisa bersuara karena dibungkam oleh lingkungan yang menindasnya. Tanpa menyadarinya dengan mendalam, gedung sekolah ternyata membawa ideologinya sendiri. Gedung bukan hanya sebatas bangunan fisik tapi mereproduksi pengetahuan di dalamnya.

Secara ilustratif, Tiwon (2014: xv-xvi) menggambarkan bahwa dalam kitab Jawa Kuno, *Tantu Panggelaran*, manusia penghuni pulau Jawa—yang baru mengalami “stabilisasi” oleh para dewa—digambarkan sebagai makhluk-mahluk tanpa peradaban: dalam keadaan telanjang mereka hidup di hutan, tanpa pekerjaan untuk ditiru. Mereka punya hanya berbuni, tidak memiliki bahasa: “mengucap tanpa mengetahui apa yang diujarkannya, tanpa mengetahui maknanya”. Dewa-Dewa kemudian turun dari kahyangan utnuk memberikan berbagai pengetahuan: menenun, membangun rumah, dan mengelola tanah. Dan tentu juga pelajaran bahasa dalam bentuk aturan-aturan jadi. Semua untuk ditiru oleh manusia.

Manusia diposisikan sebagai makhluk telanjang dan bisu yang hanya “diberi” bahsa dan pengetahuan dengan cara mengajar yang boleh dikatakan jatuh dari langit dalam bentuk utuh dan sempurna. Manusia tinggal menjadi peniru. Tidak mengherankan kalau salah satu tanda lulus adalah penorehan aksara suci pada lidah murid. Lidah yang dikenal tak bertulang (dan karenanya tidak beraturan) dengan demikian dikekang untuk hanya mengucapkan apa yang dikehendaki para dewa (penguasa). Bahasa, daya manusia untuk mengartikan dunia, mengartikan relasi social, mendirikan logos, membangun pengetahuan, hanya datang dari atas(an). Yang ada sebelum peradaban/pengetahuan datang hanya bunyi tanpa arti, tanpa daya membangun apa pun. Kebebasan untuk mengartikan dunia direnggut. Bagi

Fraire, pemangkasan kebebasan inilah yang menjadi salah satu ciri pendidikan yang menindas.

Konteks yang terjadi di Tanah Papua secara gamblang menunjukkan bagaimana pengetahuan diintroduksi oleh kuasa dari luar dan kemudian secara perlahan namun pasti menciptakan “kuasa pengetahuan” itu sendiri terhadap Tanah Papua. Penciptaan pengetahuan tentang “apa dan bagaimana itu Papua” menjadi kuasa dari rezim penjajah yang menganggap diri mereka lebih beradab daripada orang Papua. Oleh sebab itulah, kebebasan bagi orang-orang Papua untuk mendefinisikan dirinya guna membangun pengetahuan serta menafsirkan dunia menjadi terhalang.

Dasar dari keseluruhan argumentasi itu adalah konsepsi tentang “beradab” dan “tidak beradab” yang berimplikasi sangat serius terhadap cara pandang politik kebudayaan terhadap suatu bangsa dan kebudayaan. Secara tajam Tiwon (2014: xvii) mengungkapkan bahwa waktu senantiasa berjalan menuju pengetahuan, karena waktu merupakan bagian tak terlepas dari menjadi manusia dan imajinasinya. Karena itu, konseptualisasi waktu pun harus dilihat sebagai sumberdaya yang direbut, sebagai bagian yang sangat mendasar dari akumulasi awal yang membentuk kapital. Waktu dibelah menjadi menjadi dua: masa tanpa peradaban/pengetahuan di satu pihak dan masa beradab/berpengetahuan di pihak lain. Kadang-kadang diakui adanya masa ketiga, atau masa transisi, tetapi inipun menekankan pembelahan antara dua konsepsi waktu yang dipertentangkan itu. Cara pembelahan waktu karenanya sarat politik, apakah politik elit kekuasaan atau politik pembebasan, tetapi umumnya yang memiliki daya untuk menentukan pengertian waktu adalah pihak penguasa elit, sehingga bentuk peradaban dan pengetahuan merupakan cerminan kehendak elit yang memposisikan kaum bawahan untuk menjaga utuh dan lestarnya cerminan tersebut.

Di tanah Papua, kuasa untuk melegitimasi kebudayaan juga sangat kolonialistik (menjajah). Kuasa pengetahuan inilah yang membungkam orang-orang Papua untuk mendefinisikan dirinya. Jika mereka berekspresi, maka stigmatisasi separatis dengan sangat mudah dilekatkan karena mengganggu legitimasi kuasa negara. Hal yang kemudian terjadi adalah budaya bisu di tengah masyarakat, ketika ekspresi untuk menyuarakan identitas diri dan kebudayaan tersumbat.

Kebisuan di tengah-tengah kebisingan kata milik kepentingan di luar pengalaman realitas komunitas dan diri sendiri: inilah kebisuan hakiki. Dan kebisuan hakiki ini mematahkan hak dan daya untuk mendefinisikan dunia,

mematahkan hak dan daya untuk membangun pengetahuan yang bukan sekedar informasi dalam arti fungsional atau instrumental. Sistem pendidikan di Indonesia hingga kini masih menjadi matarantai pembisuan dengan sistem pendidikan yang amburadul (Tiwon, 2014: xix).

Pemerintah berulang kali menggulirkan strategi strategi baru untuk perbaikan pendidikan, dengan merujuk kepada cita-cita percerdasan kehidupan kehidupan berbangsa sebagai tujuannya. Pada rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014, sifat instrumentalis yang melihat pendidikan sekedar sebagai cara untuk mencapai target ekonomistik masih sangat terasa dalam kata kunci: “berdaya saing” (atau “kompetitif”) untuk menggambarkan manusia yang berubah menjadi “sumberdaya” (*resources*) untuk didayagunakan demi memantapkan pembangunan nasional. Target tersebut memang dibungkus dengan rangkaian panjang frasa muluk seperti “memajukan kebudayaan nasional”, membentuk “ahlak mulia”, “bermoral”, “beretika”, “berbudaya”, “beradab” yang semua tidak diberikan landasan kongkrit, tidak berakar pada penggalian cerdas terhadap pengalaman nyata dan kongkrit, tetapi hanya hidup dalam kebiasaan meniru ide abstrak.

Menjadi sumber daya yang kompetitif: kalau ini merupakan tujuan pendidikan, apa bedanya dengan membuat komoditas dengan harga bersaing? “Bersaing” karena menilai unsur manusia serendah mungkin? Lawan dari pendidikan yang sangat kapitalis ini adalah pendidikan (sekolah) yang alternatif yang berupaya mengembangkan pola pendidikan yang bukan tiruan, yang tidak sekedar melihat pendidikan secara instrumentalis, sebagai mesin pencetak sumberdaya yang bermanfaat untuk pola pembangunan yang bersandar pada rezim “pasar bebas”, rejim yang sungguh tidak membebaskan Tiwon (2014: xii).

Sekolah alternatif mengembalikan nilai manusia kepada tempatnya yang utama dalam masyarakat dan dalam sekolah, meruntuhkan tembok pemisah di antara keduanya yaitu masyarakat dan sekolah itu sendiri. Untuk itu dibutuhkan kasih sayang karena hanya kasih sayang yang dapat menjalin dialog yang sesungguhnya, dan tanpa dialog pendidikan hanya merupakan cara membuat manusia menjadi objek penguasaan. Freire (2005) dengan tajam mengungkapkan: “*If I do not love the world, If I do not nlove life, If I do not love people, I Cannot enter into dialogue*” (Kalau saya tidak mencintai dunia, kalau saya tidak mencintai kehidupan, kalau saya tidak mencintai orang-orang, saya tidak akan berdialog).

Kasih sayang dalam pendekatan Freire (2005) menjadi kunci pendidikan dialogis yang memerdekakan. Tapi justru istilah kasih sayang yang hilang dari alam pikiran kebijakan pendidikan, sehingga kita perlu bertanya apakah dunia modern sudah terlalu “maju” untuk mengakui pentingnya unsur ini dalam kehidupan, dalam pembentukan dan pemeliharaan relasi sosial. Kasih sayang ini sering dipahami dengan terlalu sempit: di dalam ruang lingkup keluarga terdekat atau cenderung dileburkan dengan kata “cinta” dalam pengertian romantis. Kasih sayang yang hampir-hampir tidak disebut sebagai dasar pendidikan pada semua taraf tidak dipahami sebagai daya positif, daya yang memanusiakan, daya yang memerdekakan.

### **Transformasi**

Dalam konteks Papua, kekerasan yang membadan dalam keseharian orang-orang Papua menjadi “pembunuh” kemerdekaan itu sendiri, disamping juga melahirkan pragmatisme untuk saling *baku tikam* (saling membunuh) diantara sesama orang Papua sendiri. Latar belakang kekerasan kemanusiaan ini adalah penjajahan (kolonisasi) pengetahuan yang dibangun untuk melebelkan berbagai citra yang negatif terhadap Papua. Masih legang dalam ingatan pejoratif (merendahkan) yang berkembang menjadi wacana diskriminatif terhadap orang-orang Papua. Diantara stigma-stigma tersebut salah satunya adalah label yang disematkan kepada “inisiatif” gerakan sosial yang dilakukan oleh orang-orang Papua yang mengkritik negara dan *apparatus* (aparatus) kekerasan dan kekuasaannya. Stigma yang disematkan adalah separatisme dan lahirnya akronim OPM (Organisasi Papua Merdeka). Negara memproduksi stigma dan juga pengetahuan untuk semakin menyudutkan kelompok masyarakat yang dianggap mengancam otoritas negara dan kekuasaannya. Reproduksi pengetahuan juga dilakukan dengan menyebarkannya menjadi wacana khalayak sehingga tercipta sebuah wacana kolektif yang berada di bawah kontrol negara dan kekuasaannya. Oleh karena begitu terfragmentasinya (terpecah dan berlapis-lapisnya) bagian dari negara tersebut, maka beroperasinya pengetahuan tentang stigma-stigma merendahkan inipun berlangsung cair namun merasuk di dalam kehidupan-kehidupan pribadi orang Papua.

Di sisi yang lain, negara dengan segala perangkat kekuasaannya secara terus-menerus mewariskan stigma merendahkan orang Papua melalui—salah satu tapi ternyata paling produktif—pendidikan bagi generasi

muda dan mewariskannya ke lingkungan masyarakat. Situasi ini berlangsung rapi dan halus melibatkan wacana pengetahuan dan kekuasaan yang kesemuanya dikontrol oleh kekuasaan.

Salah satu warisan terpenting dan paling berpengaruh hingga saat ini adalah kesukaannya untuk memperhantukan orang atau pihak-pihak tertentu yang dianggap mengancam kekuasaan negara. Budi Susanto (2003: 8) mengingatkan sepatutnya kita tidak hanya sekadar sadar, akrab, dan waspada dengan rezim “pembangunan” yang suka meminjam stabilitas “Kamtibmas”, tetapi juga berusaha untuk menemukan jejak langkah siasat massa rakyat Indonesia menghadapi strategi modern seperti ini.

Rakyat yang kebanyakan dari kalangan kecil toh jeli bersiasat ketika melihat kemangkiran dari kehadiran para penguasa di panggung identitas dan politik Indonesia. Kita harusnya mengembangkan sebuah kesadaran suatu “kepercayaan untuk tidak percaya” lagi terhadap apa yang selama ini suka diingat-ingatkan oleh rezim penguasa (Orde) Baru tentang masa lalu tunggal Indonesia. Kepercayaan seperti itu penting untuk masyarakat Indonesia masa kini mengingat bahwa kekerasan, kekejian, kekejaman, ketidakadilan dan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia sering kali juga lebih berkaitan dengan kebisuan pihak korban sendiri daripada sekadar akibat kecurigaan atau keserakahan pihak-pihak lain.

Di tengah otoritas dan operasi kekuasaan yang dijalankan oleh negara dan apparatus kekuasaannya, dimana gerakan sosial dari rakyat Papua harus bersandar? Secara tajam Giay (2000: 55-56) mengungkapkan salah satu yang bisa menjadi sandaran dari gerakan sosial rakyat Papua adalah pengalaman penderitaan dan pembunuhan terhadap rakyat Papua tidak berdosa. Pengalaman penderitaan ini telah menjadi sumber inspirasi dalam perjuangan kemerdekaan Papua Barat.

Beberapa pengalaman kekerasan dan penderitaan yang telah mempersatukan imajinasi solidaritas “pembebasan” rakyat Papua diantaranya adalah pengalaman terus-menerus dicap bodoh, belum bisa, pemabuk, bodoh yang warisannya tersisa hingga kini meskipun telah banyak perubahan di berbagai bidang. Namun perspektif berpikir diskriminatif dan kolonialistik tetap saja belum bisa dibersihkan secara total dalam pikiran kehidupan berbangsa dan bernegara bernama Indonesia.

Pengalaman lain rakyat Papua adalah secara terus-menerus diintimidasi untuk membuat pernyataan-pernyataan politik baik lisan

maupun tertulis untuk melepaskan ratusan hektar tanah adat mereka bagi kepentingan pembangunan ataupun pernyataan-pernyataan mendukung kepentingan politik penguasa walaupun bertentangan dengan kata hati sendiri. Jika kita jujur melacak jejak diskriminasi terhadap rakyat Papua juga terjadi dalam pembagian pekerjaan, promosi pekerjaan, pemberian kesempatan berusaha, kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Warisan dari sikap diskriminatif ini semakin kompleks di tengah persaingan orang-orang Papua dengan para pendatang yang menyesaki Papua. Arus migrasi yang tidak terkendali lambat laun semakin menyingkirkan orang Papua di tanahnya sendiri.

Pengalaman traumatis rakyat Papua juga terjadi sebagai akibat dari pelanggaran terhadap kemanusiaan dalam berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia orang Papua seperti pembunuhan ribuan warga masyarakat yang tidak bersalah, penahanan warga masyarakat tanpa pandang bulu. Pengalaman orang-orang Papua yang merasakan kekerasan tersebut tersimpan dalam ingatan personal orang Papua dan hidup sepanjang zaman dan terwariskan kepada generasi berikutnya. Pengalaman kekerasan orang-orang Papua pada hakekatnya sangat merendahkan martabat manusia pada umumnya, martabat dan mental penguasa dalam negara ini dan khususnya martabat orang Papua yang harus diperjuangkan untuk ditegakkan. Pengalaman orang Papua terhadap kekerasan dan penderitaan melahirkan sikap anti Indonesia dan peradaban bangsa Indonesia. Rakyat Papua secara kolektif telah dihadapkan untuk menjalani pengalaman traumatis yang disebabkan oleh perlakuan apparatus negara Indonesia. Pengalaman masa lampau demikian, dari satu sisi dapat menjerumuskan orang Papua ke dalam lautan dan belunggu kebencian dan kesedihan. Pengalaman kekerasan dan penderitaan tersebut sangat sulit untuk dihilangkan dari ingatan kolektif orang Papua, dan sangat berpengaruh secara serius dalam pemahaman diri orang Papua sendiri yang dapat menghancurkan masa depan (Giay, 2000: 56-57). Oleh karena itulah sangat penting untuk menguraikan pengalaman kekerasan dan penderitaan orang Papua tersebut dalam kajian lebih dalam dan dibarengi dengan advokasi. Hal ini dilakukan agar ruang-ruang mediasi yang memfasilitasi pengalaman-pengalaman kekerasan orang Papua termediasi dan diketahui publik.

Oleh sebab itulah menjadi penting untuk menggali bagaimana rakyat sendiri melihat dirinya sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman sosial, ekonomi, dan budaya. Seringkali kajian-kajian terhadap suatu komunitas hanya dilihat dari perspektif tertentu saja, misalkan saja kajian tentang

masyarakat kepulauan masih dilihat dari darat atau daratan saja secara antropologis dengan uraian etnologi yang hanya terbatas pada konsep tentang daratan dan tentang ke-Indonesiaan, tidak pernah merekognisi imajinasi dan pengalaman-pengalaman masyarakat setempat. Bagi masyarakat yang berdomisili di kepulauan, perairan adalah justru sebagai jembatan dan bukan penghalang kehidupan sehari-hari massa rakyat maritime dan nelayan. Berperahu menjadi kegiatan yang membentuk wacana orang-orang yang berdomisili di laut tentang pulau, pantai, laut, karang, ikan dan yang lainnya, ketika mereka harus mulai dari awal mampu meniru sampai menafsir hegemoni hal dan barang-barang pembangunan modern—yang datang dari masyarakat di darat maupun di pusat kota di Jakarta.

Dengan demikian, menjadi orang (dengan identitas) Indonesia tidak harus ditemukan dan dikait-kaitkan dengan wasiat kebudayaan asli (dan adiluhung) mereka—sebagaimana biasa dikerjakan kalangan colonial tempo dulu. Berdasar pengamatan terhadap kebudayaan populer dalam kehidupan massa rakyat kecil yang tidak jarang menampilkan ironi modernitas, kebudayaan (orde) baru dengan didukung oleh hegemoni kekuasaan dan identitas ikutannya akan selalu kedodoran akibat celah retak bawaannya. Salah satunya adalah fenomena urbanisasi yang bukan saja bercerita tentang kota besar dengan segala daya tariknya, di satu sisi, dan desa miskin dengan segala himpitannya di sisi yang lain. Penelitian yang menempatkan kajian mikrohistoris dalam interelasinya dengan konteks makro historis ini mengungkap ironi, paradox, dan ambivalensi modernitas yang muncul dari siasat massa rakyat yang sering kali tak terduga—ketika mereka berhadapan dengan strategi politik pembangunan ekonomi (Orde) Baru. (Susanto, S.J, 2003: 9-15).

Siasat politik budaya rakyat sangat sentral diperbincangkan dan menjadikannya wacana umum. Salah satu dasar yang bisa dijadikan pijakan dalam memediasi gerakan-gerakan sosial di dalam komunitas-komunitas Papua adalah pengalaman *memoria passionis* (kekerasan dan penderitaan) bersama. Pengalaman *memoria passionis* ini bisa dijadikan wacana publik dengan membicarakannya secara terbuka dan melakukan usaha-usaha rekonsiliasi diantara berbagai pihak dalam rangka memposisikan diri atau mereposisi diri untuk menata masa depan. Seturut dengan membuka wacana dan rekonsiliasi, pengalaman *memoria passionis* akan menjadi cermin dan sekaligus juga sumber kekuatan yang melahirkan ide untuk menyusun strategi melawan penguasa negara tetapi juga bisa melahirkan visi tentang

masa depan Papua Baru berdasarkan ideologi rakyat Papua menuju Papua Merdeka (Giay, 2000:57).

## Kesimpulan

Lilin kehidupan bagi rakyat Papua adalah kesadaran mereka untuk bangkit dan “memimpin” diri mereka sendiri untuk membebaskan pikiran dan praktik kehidupan sehari-hari. Introduksi kekerasan dan penderitaan yang dialami dan terwariskan melahirkan budaya bisu di tengah masyarakat untuk bersuara dan bersaksi. Namun, keterpecahan yang terjadi di tengah komunitas Papua justru lahir dari pragmatisme orang-orang Papua untuk mengingkari kekerasan dan penderitaan tersebut. Pragmatisme yang dimaksudkan adalah *baku tikam* (saling membunuh) untuk mendapatkan keuntungan ekonomi politik yang ditawarkan oleh kekuasaan. Oleh sebab itulah memecah budaya bisu membutuhkan siasat-siasat untuk kembali berefleksi untuk kemudian memikirkan siasat politik budaya rakyat yang berpondasikan penegakan martabat kemanusiaan bagi orang-orang Papua. Hanya dengan demikianlah kebisuan akan berubah menjadi pembebasan yang akan memungkinkan orang-orang Papua untuk bergerak dan mendefinisikan “dunia”nya.

## Daftar Pustaka

- Freire, Paulo. 2005. *Pendidikan Kaum Tertindas, Pedagogy of the Oppressed*. Jakarta: LP3ES.
- Giay, Benny, 2000. *Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran sekitar Emansipasi Orang Papua*. Jayapura: Deiyai/Els-ham Papua.
- Susanto Sj, Budi (ed). 2003. *Membaca Postkolonialitas (di) Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius dan Lembaga Studi Realino.
- Tiwon, Slyvia. 2014. "Sekolah Memecah Bisu" prolog dalam Toto Raharjo, *Sekolah Biasa Saja, Catatan Pengalaman Pendidikan Dasar di Sanggar Anak Alam SALAM*. Yogyakarta: Sanggar Anak Alam.
- Widjojo dkk, Muridan. 2009. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Past and Securing the Future*. Jakarta: Buku Obor, LIPI dan TIFA.



[www.suarapapua.com](http://www.suarapapua.com).

<http://suaraPapua.com/read/2015/12/19/3041/kebijakan-membangun-papua-jokowi-dinilai-seperti-daendels-kedua> (diakses 23 Desember 2015).